

ABSTRAK

Fratiwi Rachmaningtyas. 210211050110. Tesis, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru.* DR. H. Jalaluddin M.Hum, DR. Hj. Halimatus Sakdiah M.Si, pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci : *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung no.5 tahun 2019, kondisi psikologis.*

Dalam perkawinan Islam tidak menyebutkan batasan usia secara jelas, sehingga dalam melangsungkan perkawinan umumnya standar yang menjadi acuan bagi calon mempelai adalah sudah mencapai usia baligh. Rasulullah menyebutkan pemuda untuk menikah jika sudah dalam keadaan mampu. Ukuran kemampuan yang disebutkan dapat dimaknai sebagai kesiapan baik dari sisi fisik, yaitu kesehatan secara umum maupun kesehatan reproduksi. Kemampuan mempelai juga di ukur dalam aspek ekonomi.

Tingginya perkawinan di bawah umur membuat semua pihak merumuskan regulasi dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung no.5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin menggunakan pedoman ini dalam persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas dari Perma no.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian lapangan dilakukan dengan teknik *purposed sampling*. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

Data pada penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung no.5 tahun 2019 telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh hakim dalam persidangan dispensasi kawin. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mengenai pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru cukup efektif. Hal ini dilihat dari faktor substansi hukum yang telah terlaksana, hanya saja ada sebagian substansi hukum yang belum terlaksana untuk menimbang, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan perbedaan usia menurut ketentuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dengan Undang Undang Perkawinan yang menyebabkan calon mempelai di atas 18 tahun tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis oleh Puspa Berkarakter Banjarbaru. Hakim juga belum menggunakan pendampingan konselor anak dalam ruang sidang untuk melihat kondisi psikologis dan kesiapan anak.

ABSTRACT

Fratiwi Rachmaningtyas. 210211050110. *The Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 in Examination of the Psychological Conditions of Underage Marriage at the Religious Court of Banjarbaru.* Dr. H. Jalaluddin M. Hum, DR. Hj. Halimatus Sakdiah M.Si, in the Postgraduate Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Keywords: *Effectiveness of Supreme Court Regulation no. 5 of 2019, psychological conditions.*

In Islamic marriages, there is no clear age limit, so that in carrying out a marriage, the standard that is used as a reference for the prospective bride and groom is that they have reached the age of puberty. The Messenger of Allah mentioned that young people should marry if they are able. The measure of ability mentioned can be interpreted as readiness both from a physical perspective, namely general health and reproductive health. The ability of the bride and groom is also measured in the economic aspect.

The high rate of underage marriages has forced all parties to formulate regulations with the aim of guaranteeing the fulfillment of children's rights, namely education, health, and the economy as a form of child protection. One of them is Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage. The judge who examines the request for dispensation from marriage uses these guidelines in court.

This study aims to find out how the implementation and effectiveness of Perma no.5 of 2019 at the Banjarbaru City Religious Court. The research method used is an empirical legal research method that is qualitative in nature. This type of field research was carried out using a purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out using semi-structured interviews, observation, and documentation using data collection instruments that had gone through content validation. Data analysis was performed using a qualitative descriptive analysis technique.

Data from research shows that Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 has been properly implemented by judges in marriage dispensation trials. The Effectiveness of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning examination of the psychological condition and readiness of children for consideration by judges at the Banjarbaru City Religious Court is quite effective. This can be seen from the factor of legal substance that has been implemented, it's just that there are some legal substances that have not been implemented to weigh, decide and determine the request for dispensation of marriage at the Banjarbaru City Religious Court. This is due to the age difference according to the provisions of the Women's Empowerment Service for Child Protection with the Marriage Law which causes prospective brides over 18 years of age not to receive a psychological examination by the Puspaga. The judge also has not used the assistance of a child counselor in the courtroom to see the child's psychological condition and readiness.